

Menggali nilai Pancasila dalam menyikapi kasus intoleransi di masyarakat

Dini Febriana Sofi

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: dinifebri2202@gmail.com

Kata Kunci:

Intoleransi, keberagaman, Pancasila, penegakan hukum, masyarakat

Keywords:

Intolerance, diversity, Pancasila, law enforcement, public

ABSTRAK

Fenomena intoleransi di Indonesia, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, merupakan ancaman serius bagi stabilitas sosial dan hak-hak individu. Meskipun Pancasila mempromosikan toleransi dan keberagaman, sejumlah faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang Pancasila, sistem pendidikan yang tidak memadai, pengaruh media sosial, ideologi ekstrem, dan kurangnya pengetahuan hukum, berkontribusi pada munculnya intoleransi. Memahami sila-sila Pancasila sangat penting untuk mencegah intoleransi. Setiap sila Pancasila, mulai dari ritual yang berkaitan dengan ketaatan beragama hingga interaksi sosial, membantu menciptakan komunitas yang beragam. Pendidikan yang baik, interaksi sosial yang konstruktif, dan penggunaan media sosial secara tepat waktu dapat membantu memperkuat pemahaman ini. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa intoleransi tidak dilanggar. Diyakini bahwa dengan memasukkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia akan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih damai, adil, dan bersatu.

ABSTRACT

The phenomenon of intolerance in Indonesia, which is based on Pancasila principles, is a serious threat to social stability and individual rights. Even though Pancasila promotes tolerance and keberagaman, a number of factors, including a lack of understanding of Pancasila, an inadequate educational system, the influence of social media, extreme ideologies, and a lack of legal knowledge, contribute to the emergence of intolerance. Understanding the principles of Pancasila is crucial for preventing intolerance. Every Pancasila sila, starting from rituals related to religious observance to social interactions, helps to create a diverse community. Good education, constructive social interactions, and the use of social media in a timely manner can all help to strengthen this understanding. Tegas hukum penegakan is also necessary to ensure that intolerance is not violated. It is believed that by incorporating Pancasila principles into daily life, Indonesia will be able to bring about a more peaceful, adil, and united populace.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman (Iqbal, 2024). Sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai luhur, Pancasila menjadi pedoman untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial (Setyadi et al., 2023). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait munculnya berbagai kasus intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Intoleransi di masyarakat tercermin dari berbagai bentuk, seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu, konflik antaragama, ujaran kebencian di media sosial,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hingga tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu (Takwin et al., 2016). Diskriminasi terhadap kelompok tertentu sering kali terjadi dalam bentuk pengucilan sosial, pembatasan akses terhadap sumber daya, dan stigma negatif yang melanggengkan ketidakadilan. Kelompok-kelompok minoritas, baik dalam hal etnis, agama, maupun status sosial, sering kali menjadi korban dari praktik diskriminasi ini, yang tidak hanya melukai rasa keadilan tetapi juga memicu ketimpangan yang semakin dalam di masyarakat.

Konflik antaragama muncul dari minimnya pemahaman dan penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda, yang kemudian memicu segregasi sosial serta gesekan antarkelompok. Konflik semacam ini sering kali diperburuk oleh aktor-aktor yang memanfaatkan isu agama untuk memecah belah masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, hubungan antarumat beragama yang seharusnya didasari oleh semangat saling menghormati dan toleransi, berubah menjadi ladang konflik yang sulit diredakan. Ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan tersendiri di era digital.

Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan informasi, sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan narasi kebencian, hoaks, dan provokasi yang memperparah ketegangan di masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian yang tidak terbandung ini mempercepat polarisasi sosial, memicu ketidakpercayaan antarindividu, dan mempersempit ruang dialog yang sehat. Lebih jauh lagi, tindakan kekerasan atas nama agama atau ideologi sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan sentimen keagamaan untuk mencapai tujuan politik atau kelompok tertentu. Kekerasan semacam ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan material, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi korban serta merusak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah.

Semua bentuk intoleransi ini secara kolektif menciptakan situasi yang mengancam harmoni sosial, stabilitas nasional, dan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Lebih parahnya, fenomena ini menimbulkan rasa ketidakamanan di tengah masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah, dan menciptakan celah bagi masuknya pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Fenomena ini tidak hanya mengancam persatuan bangsa tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Intoleransi juga bertentangan langsung dengan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu, dan sila ketiga, "Persatuan Indonesia," yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Kasus intoleransi sering kali berakar pada berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, penyebaran informasi yang salah di media sosial, fanatisme agama, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Minimnya dialog yang konstruktif antarindividu dan kelompok juga memperparah kondisi ini, sehingga masyarakat cenderung terjebak dalam polarisasi yang memicu konflik lebih lanjut. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi memberikan kesan bahwa tindakan tersebut dapat diterima, sehingga semakin memperburuk situasi.

Dalam konteks ini, menggali kembali nilai-nilai Pancasila menjadi upaya yang sangat relevan dan mendesak untuk membangun kembali kesadaran kolektif akan

pentingnya toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan solidaritas sosial. Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, penguatan karakter, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi (Melviana et al., 2022). Peran lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda, yang akan menjadi pilar masa depan bangsa.

Selain itu, upaya memperluas dialog lintas budaya dan agama juga menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dialog semacam ini tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarindividu dan kelompok, tetapi juga menjadi forum untuk menyelesaikan perbedaan secara konstruktif dan menghindari potensi konflik. Pendekatan ini harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan individu untuk berperan aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila (Aziz, 2016). Hal ini tidak hanya sebagai respons terhadap kasus intoleransi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat persatuan bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan begitu, Indonesia dapat kembali menjadi contoh nyata bagi dunia dalam mewujudkan harmoni di tengah keberagaman.

Pembahasan

Faktor Penyebab Munculnya Intoleransi Di Indonesia yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Pancasila.

Indonesia adalah negara yang memiliki dasar ideologi Pancasila, yang menegaskan komitmen kuat terhadap keberagaman, toleransi, dan kerukunan hidup di tengah masyarakatnya. Sebagai sebuah bangsa yang multikultural dengan beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama untuk menjaga harmoni di antara warganya (Santoso et al., 2023). Namun, kenyataannya, di berbagai tempat masih sering ditemukan fenomena intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan besar bagi persatuan bangsa, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di masyarakat. Seperti kasus intoleransi yang terjadi pada Hari Raya Nyepi di Bali tahun 2024. Hari Raya Nyepi adalah perayaan penting bagi umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, untuk menyambut Tahun Baru Saka dengan makna kebangkitan, pembaruan, persatuan, toleransi, dan kedamaian. Tradisi ini dilakukan dengan cara nyepi selama 24 jam. Namun, Nyepi tahun 2024 diwarnai oleh tindakan intoleran beberapa oknum di Jembrana yang mengganggu ketenangan perayaan. Umat Hindu Bali khususnya di Jembrana merasa terganggu oleh beberapa oknum yang berkeliaran di jalanan. Di media sosial juga beredar pawai ogoh-ogoh yang menggunakan sound system, tindakan tersebut merupakan bentuk dari intoleransi terhadap budaya sendiri karena tidak sesuai dengan nilai budaya Bali. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi penyebab munculnya intoleransi di Indonesia.

1. Kurangnya Pemahaman tentang Pancasila

Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar ideologi dan panduan moral bangsa, sering kali masih dangkal (Efendi et al., 2025). Banyak individu hanya mengenal Pancasila sebagai simbol negara tanpa memahami secara mendalam makna dari setiap sila. Sebagai contoh, sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya menghormati keberagaman, sedangkan sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menggaris bawahi perlunya keadilan yang merata tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras. Ketidaktahuan ini dapat memunculkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti diskriminasi atau sikap eksklusif terhadap kelompok tertentu. Nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan melalui sikap saling menghargai, tolong-menolong, dan hidup rukun dalam masyarakat (Mulyoto, 2020a).

2. Sistem Pendidikan yang Kurang Optimal

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sejak dini. Sayangnya, di beberapa daerah, sistem pendidikan masih belum maksimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum. Kurikulum yang kurang menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama, budaya gotong royong, atau penghormatan terhadap perbedaan dapat membuat generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang kurang tentang pentingnya harmoni sosial. Ketiadaan kegiatan pendidikan yang mendorong interaksi antaragama dan antarbudaya juga menjadi hambatan dalam membangun sikap saling menghormati.

3. Pengaruh Media Sosial dan Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat

Dalam era digital, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Sayangnya, platform ini sering kali menjadi lahan subur untuk menyebarkan ujaran kebencian, informasi bias, berita palsu (hoaks), dan propaganda yang menyudutkan kelompok tertentu. Konten-konten semacam ini dengan mudah memicu ketegangan antarindividu maupun antarumat beragama, yang bertentangan dengan sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Media sosial, jika tidak digunakan secara bijak, dapat menjadi alat untuk memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat.

4. Pengaruh Ideologi Ekstrem dan Fanatisme Agama

Ideologi ekstrem dan pemahaman agama yang sempit sering kali menjadi penyebab intoleransi. Beberapa individu atau kelompok yang terpengaruh oleh pandangan ekstrem cenderung melihat dunia dalam perspektif hitam-putih, di mana hanya kelompok mereka yang dianggap benar. Hal ini mendorong sikap eksklusif dan cenderung mengesampingkan nilai-nilai Pancasila, seperti sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Fanatisme agama yang berlebihan juga dapat memicu konflik antarumat beragama jika tidak dikelola dengan baik.

5. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Tindakan Intoleran

Penegakan hukum yang lemah terhadap tindakan intoleran memberikan ruang bagi perilaku tersebut untuk terus berkembang. Ketika pelaku intoleransi tidak mendapatkan sanksi yang tegas, hal ini tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara untuk melindungi keberagaman. Sebagai contoh, sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan pentingnya keadilan dan musyawarah dalam kehidupan berbangsa. Ketidaktegasan dalam menangani kasus-kasus intoleransi justru menciptakan preseden buruk dan semakin memperburuk kondisi kerukunan.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab ini, diharapkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga pendidikan, dapat mengambil langkah konkret untuk mencegah intoleransi dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Upaya ini menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan, keharmonisan, dan keadilan sosial di Indonesia yang beragam.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila Dapat Mempengaruhi Upaya

Pencegahan Intoleransi di Indonesia

Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila memiliki pengaruh yang mendalam terhadap upaya pencegahan intoleransi di Indonesia. Sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa, Pancasila memberikan landasan nilai-nilai universal yang mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif (Astuti et al., 2021). Dalam konteks keberagaman Indonesia, pemahaman yang benar dan mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila sangat menentukan efektivitas langkah pencegahan intoleransi. Setiap sila dalam Pancasila mengandung pesan penting yang relevan untuk mendorong sikap toleran.

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, sehingga mengurangi potensi konflik akibat fanatisme agama. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengajarkan penghargaan terhadap martabat setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menggarisbawahi pentingnya menciptakan keadilan sosial untuk mengurangi kesenjangan yang dapat memicu intoleransi.

Pendidikan memiliki peran kunci dalam menanamkan pemahaman tentang Pancasila (Sulastri et al., 2022). Kurikulum pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan Pancasila sebagai teori, tetapi juga mendorong pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membiasakan generasi muda untuk berpikir kritis dan memahami pentingnya toleransi, pendidikan dapat menciptakan individu yang menghargai keberagaman dan menolak perilaku intoleran. Selain melalui pendidikan formal,

pemahaman terhadap Pancasila juga terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya. Masyarakat yang aktif mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan dan mengedepankan musyawarah, cenderung lebih mampu mencegah munculnya konflik yang berakar pada intoleransi. Inisiatif masyarakat lokal dalam menjaga harmoni keberagaman dapat menjadi contoh nyata penerapan Pancasila.

Di era digital, media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Namun, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda negatif sering kali memperburuk situasi intoleransi. Pemahaman yang baik tentang Pancasila dapat menjadi alat untuk menangkal pengaruh negatif tersebut. Masyarakat yang memahami nilai-nilai Pancasila akan lebih kritis terhadap informasi yang tidak akurat dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang mendukung toleransi. Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleran. Ketika pelaku intoleransi tidak mendapatkan sanksi yang tegas, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya negara dalam menjaga kerukunan. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan sesuai dengan prinsip Pancasila, terutama sila kedua dan keempat, untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila merupakan fondasi penting dalam upaya mencegah intoleransi di Indonesia (Nini Adelina Tanamal & Sapta Baralaska Utama Siagian, 2022). Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, interaksi sosial, dan penggunaan media yang bijak, masyarakat dapat membangun sikap yang lebih toleran dan menghormati perbedaan. Dukungan penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga diperlukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan pemahaman dan penerapan yang menyeluruh, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan bersatu dalam keberagaman.

Peran Setiap Sila dalam Pancasila dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia

Setiap sila dalam Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan keberagamannya. Sila pertama, *Ketuhanan yang Maha Esa*, menekankan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan dan agama yang dianut oleh masyarakat (Adityo, 2017). Nilai ini menggaris bawahi bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan tanpa tekanan atau diskriminasi. Dengan mengakui kebebasan beragama sebagai hak asasi yang fundamental, sila pertama menjadi landasan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan saling menghargai.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menanamkan nilai penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya dengan bebas. Sila ini mengajarkan masyarakat untuk memandang perbedaan keyakinan sebagai sesuatu yang wajar dan berharga, serta mendorong mereka untuk memperlakukan satu sama lain secara adil dan penuh rasa hormat.

Dengan prinsip ini, hubungan antar umat beragama dapat dijaga dalam semangat saling memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya. Keberagaman yang ada tidak seharusnya menjadi penghalang bagi persatuan, tetapi justru menjadi kekuatan dalam membangun identitas nasional yang inklusif. Dengan mengedepankan persatuan, masyarakat Indonesia dapat menghindari potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama dan keyakinan.

Selanjutnya, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mendorong penyelesaian konflik atau perbedaan pandangan melalui musyawarah yang bijaksana. Nilai ini mengajarkan bahwa dialog dan komunikasi yang terbuka adalah cara terbaik untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan antar umat beragama. Dalam praktiknya, musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan dan keadilan dapat menjadi sarana untuk menciptakan kerukunan dan menghindari konflik yang berpotensi merusak harmoni sosial.

Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama, memiliki hak yang sama untuk menikmati keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai ini menuntut adanya kesetaraan dan kebijakan yang adil, sehingga tidak ada kelompok agama yang merasa diperlakukan secara diskriminatif. Dengan mengatasi ketimpangan sosial, potensi konflik yang dipicu oleh ketidakadilan dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat hidup dengan damai.

Dengan penerapan nilai-nilai dari setiap sila, Pancasila menjadi pedoman yang kokoh dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang rukun, harmonis, dan toleran. Nilai-nilai ini memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk menghadapi tantangan keberagaman, sekaligus menjadi alat untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai dan bersatu. Pembelajaran pancasila tidak cukup bersifat teoritis, tetapi harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai praksis seperti tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan sosial sebagai bagian dari karakter antikorupsi (Mulyoto, 2020b). Di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi yang sering kali memunculkan tantangan baru terhadap kerukunan umat beragama, Pancasila tetap relevan sebagai pijakan yang kuat untuk menjaga keutuhan bangsa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila yang menegaskan pentingnya keberagaman, toleransi, dan kerukunan. Namun, berbagai tantangan seperti intoleransi terus mengancam stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Fenomena intoleransi, termasuk pada perayaan Hari Raya Nyepi 2024 di Bali, menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap Pancasila, pengaruh media sosial yang negatif, sistem pendidikan yang kurang optimal, ideologi ekstrem, dan lemahnya penegakan

hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah nyata dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan guna memperkuat nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah seperti pendidikan inklusif, penggunaan media sosial yang bijak, penegakan hukum tegas, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya serta agama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat multikultural Indonesia.

2. Pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila memiliki peran penting dalam mengatasi intoleransi di Indonesia. Sebagai ideologi dan pedoman hidup, setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang mengarahkan masyarakat untuk hidup rukun, toleran, dan inklusif. Pendidikan, baik melalui kurikulum formal maupun dalam interaksi sosial sehari-hari, menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Di tengah perkembangan era digital, pemahaman Pancasila yang baik juga membantu masyarakat menghindari pengaruh negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian. Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan yang menyeluruh, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, bersatu, dan adil di tengah keberagaman.
3. Setiap sila dalam Pancasila memainkan peran penting dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman. Sila pertama menekankan penghormatan terhadap kebebasan beragama, memberikan dasar untuk kehidupan bermasyarakat yang damai. Sila kedua mengajarkan penghargaan terhadap martabat manusia dan mendorong keadilan dalam memperlakukan perbedaan keyakinan. Sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman, menjadikannya kekuatan bangsa. Sila keempat mempromosikan penyelesaian konflik melalui musyawarah yang bijaksana, sementara sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial yang merata untuk mencegah diskriminasi. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menciptakan harmoni, toleransi, dan persatuan di tengah tantangan keberagaman. Dalam era globalisasi, Pancasila tetap menjadi panduan yang relevan untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa.

Saran

1. Untuk mencegah intoleransi dan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. Pertama, pemahaman terhadap Pancasila harus ditingkatkan melalui program edukasi yang berkesinambungan, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Sosialisasi tentang makna dan implementasi setiap sila perlu dilakukan agar masyarakat memahami Pancasila sebagai panduan hidup. Kedua, sistem pendidikan harus dioptimalkan dengan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan gotong royong. Program pendidikan dapat mencakup kegiatan lintas budaya dan agama untuk membangun sikap saling menghargai sejak dini. Ketiga, pengawasan terhadap media sosial perlu ditingkatkan untuk meminimalkan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Literasi digital masyarakat juga harus

diperkuat agar media sosial dapat digunakan secara bijak untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Keempat, pendekatan dialogis dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat perlu dilakukan untuk melawan ideologi ekstrem. Pendidikan agama yang moderat dan inklusif harus didorong agar masyarakat lebih menghormati keberagaman. Kelima, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi harus dilakukan dengan tegas dan adil untuk memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selain itu, pemberdayaan komunitas lokal harus didukung melalui forum kerukunan umat beragama dan kegiatan lintas budaya yang mendorong harmoni sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan intoleransi dapat diminimalkan, dan nilai-nilai Pancasila semakin terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Untuk mengatasi intoleransi di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diterapkan. Pertama, pendidikan harus memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, tidak hanya secara teori tetapi juga melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kegiatan lintas budaya dan antarumat beragama harus didorong untuk mempererat hubungan antarumat beragama. Ketiga, literasi media harus diperkuat agar masyarakat dapat memilah informasi dengan bijak dan menghindari hoaks serta ujaran kebencian di media sosial. Keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas terhadap tindakan intoleran agar menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan toleran dalam keberagaman.
3. Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diimplementasikan. Pertama, pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat di sekolah dan masyarakat untuk memupuk pemahaman dan toleransi. Kedua, dialog antar umat beragama harus diperluas, memanfaatkan sila keempat Pancasila untuk mempromosikan musyawarah dan kebijaksanaan. Ketiga, kebijakan publik dan penegakan hukum harus mencerminkan sila kelima Pancasila untuk mengatasi ketidakadilan. Keempat, literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari informasi yang menyesatkan. Terakhir, setiap individu harus mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang rukun dan damai. Dengan langkah-langkah ini, Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan dalam menghadapi tantangan keberagaman di era modern.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2017). Geneologis nilai-nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945. *FIKRI: Jurnal Agama, Sosial dan Kajian Budaya*, 2 (2). Pp. 485-522. <http://repository.uin-malang.ac.id/11303/>
- Astuti, S. T., Najicha, F. U., Hukum, F., Maret, U. S., Yang, K., Esa, M., & Indonesia, P. (2021). Pancasila sebagai landasan etika dalam berperilaku masyarakat Indonesia.
- Aziz, A. (2016). Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan. *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII(1), 29–56.

- Efendi, T. S., Savitri, N. D., Putri, A. L., Puspita, D., Annaufal, R., & Ghani, Y. A. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digital Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia juga menjadi tantangan utama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari. 3.
- Iqbal, I. (2024). Pancasila Dalam Perseptif Multikulturalisme: Menjaga Kesatuan Dan Keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 690–699.
- Melviana, Amanda Putri, D., Qomariah, A., Hodijahtun Nisa, N., & Gustian Nugraha, R. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2253–2259.
- Mulyoto, G. P. (Director). (2020a). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10827/>
- Mulyoto, G. P. (2020b). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.31062>
- Nini Adelina Tanamal, & Sapta Baralaska Utama Siagian. (2022). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 172–189. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.341>
- Santoso, G., Aulia, A. N., Indah, B. S. N., Lestari, D. P., Ramadhani, F. F., Alifa, H., & Mahya, A. F. P. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 183–194.
- Setyadi, F. G., Ardiyansyah, I., & Rohkim, M. I. N. (2023). Pancasila sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(No. 5), 401–406.
- Sulastri, S., Syahril, S., Adi, N., & Ermita, E. (2022). Penguatan pendidikan karakter melalui profil pelajar pancasila bagi guru di sekolah dasar. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(3), 583. <https://doi.org/10.29210/30032075000>
- Takwin, B., Mudzakir, A., Salim, H., Ahnaf, M. I., & Hamdi, A. Z. (2016). Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia. 1–260.